

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Pembentukan ruang - ruang

Bangunan memiliki banyak unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain, siapa manusia itu sebenarnya, apa kebiasaan-kebiasaannya, bagaimana sikap dan pola tata laku serta apa yang dibutuhkan baik secara fisik maupun psikologis.

Tetapi pada kenyataannya banyak bangunan yang telah berdiri hanya mementingkan fisik, tanpa membaca dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sebagai penghuni.

Oleh karena itu sering terjadinya kegagalan dalam desain, misalnya sebuah bangunan setelah dihuni seringkali diterima penghuninya sebagai lingkungan yang membosankan bahkan tidak ramah, terkadang terdapat ruang yang tidak dapat mengakomodasi kebutuhan penghuni sebagaimana fungsi ruang itu sendiri.

Winston Churchill (1943), "*We shape our building and afterwards our building shape us*". Manusia akan membentuk ruang dilingkungannya. Pembentukan ruang-ruang tersebut juga dipengaruhi aspek-aspek yang ada dalam diri manusia yaitu aspek psikologis dan aspek sosial dalam lingkungan.

Dalam hal ini sebuah desain arsitektur menjadi fasilitator antara perilaku manusia sebagai penghuni dan ruang sebagai lingkungan yang didiaminya.

¹ Joyce Marcella Laurens, *Arsitektur dan Perilaku Manusia*, hlm. 1

Salah satu langkah untuk mendapatkan suatu disain yang sesuai dan baik adalah dengan melakukan penelitian terhadap disain kemudian menganalisanya. Desain dari sebuah rancangan bangunan atau ruang kemudian di analisa melalui beberapa penilaian antara lain dapat dilihat dari sejarah bangunan itu, memprediksi dan mengevaluasi.

Dengan mengetahui lebih dalam tentang desain bangunan dan ruangan itu nantinya akan diketahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, selanjutnya dapat diberikan alternatif-alternatif desain dengan sebuah pola-pola rancangan untuk dijadikan acuan dalam mendisain kembali bangunan atau ruang yang sama.

Penelitian ini kasusnya mengambil dari rancangan tata ruang rumah kedinasan bupati, dimana sistem protokoler pada rumah kedinasan bupati tersebut mempengaruhi dalam merancang tata ruangnya, hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan denah beberapa rumah kedinasan di daerah studi kasus.

2. Studi kasus empat rumah dinas bupati

Apa saja yang dipengaruhi oleh sistem keprotokolan pada sebuah rumah kedinasan bupati perlu untuk dicari dan di analisa, apakah ada perbedaan dalam peletakan ruang dan juga skala ruang. Dengan membandingkan dan membaca rancangan tata ruang di tiap denah maka kita dapat melihat pola-pola yang terbentuk dan kemudian akan mendapatkan nilai kedalaman ruangnya. Nilai kedalaman ruang yang dihasilkan dapat dipakai untuk menentukan hirarki suatu ruang. Hasil dari penelitian itu menghasilkan suatu standar-standar yang pasti

dan digunakan ketika ingin membangun sebuah bangunan dan ruang yang sama, atau nantinya berupa sebuah rekomendasi disain yang berbentuk *guide line*.

Wilayah studi kasus penelitian diambil dari empat kabupaten yang berada di propinsi Sumatera Selatan.

Secara administratif propinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) pemerintahan kabupaten dan 4 (empat) kota.

Empat kabupaten yang dipilih itu adalah ; Kabupaten Muara Enim dengan ibu kota Muara Enim , kabupaten Musi banyuasin dengan ibu kota Sekayu, kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ibu kota Kayu Agung, kabupaten Ogan Ilir dengan ibu kota Indralaya.

Empat kabupaten yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini dipilih karena cukup representatif dan dapat dijangkau dengan waktu tidak terlalu lama bagi penulis. Kabupaten Muara Enim memiliki luas 9.328,77km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 621.623 jiwa, kabupaten Musi Banyuasin memiliki luas 14.265,96 km², dengan jumlah penduduk pada 2001 468.143 jiwa, kabupaten Ogan Ilir dengan luas 1.902.203 m² / Ha dengan jumlah penduduk 656.828 jiwa pada tahun 2005, kabupaten Ogan Ilir dengan luas 2.666,07 km², dengan jumlah penduduk 350.298 jiwa.²

²Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Profil & Potensi Pembangunan Sumatera Selatan menuju Lumbung Energi dan Pangan*, hlm. 1

Gambar I.1
Gambar peta Propinsi Sumatera Selatan



Kepala pemerintahan tertinggi di sebuah kabupaten adalah seorang bupati. Jabatan bupati yang telah di atur melalui UU no.32/2005. Dalam masa jabatannya seorang bupati akan diberi fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk menunjang dirinya dalam memperlancar dan mempermudah pada saat menjalankan tugas-tugas di dalam pemerintahan. salah satu fasilitasnya adalah rumah dinas.

3. Sistem protokoler

Rumah dinas bupati juga difungsikan oleh bupati untuk tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah setelah lepas dari jam kerja di kantor pemerintah daerah. Di dalam rumah ini seluruh fasilitas sudah

dipersiapkan baik dari fisik misalnya ruang-ruang yang mewadahi bermacam-macam aktifitas.

Dari segi nonfisik para pekerja-pekerja yang memiliki tugas masing-masing juga telah disiapkan untuk membantu kelancaran semua aktifitas yang akan berlangsung di sana. Hal-hal tersebut di atas hasil pengamatan penulis pada sebuah rumah dinas bupati di kabupaten Ogan Ilir.

Aktifitas-aktifitas yang berlangsung di sana telah diatur dalam sebuah sistem yaitu sistem protokol. Sistem keprotokolan ini diperuntukkan bagi seluruh penghuni dan orang yang akan berkunjung.

Protokol diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur jalannya suatu upacara, acara dan pertemuan atau perjamuan. Kedudukan protokol di dalam rumah tersebut merupakan suatu sistem untuk mengatur semua kegiatan dan juga untuk membedakan kedudukan yang bertingkat-tingkat yang terbagi menurut bagian, sub-bagian, seksi-seksi pegawai dan pembantu.

Sistem protokoler dipakai alat untuk mengatur agar jalan pelayanan dengan instansi lain dan masyarakat dapat tertib, teratur, lancar, dan sesuai dengan tujuan. Rumah pada umumnya memiliki sistem keprotokolan, tamu yang datang berkunjung memiliki tata krama dan aturan juga, tetapi tidak sekomplek dan seformal seperti di rumah kedinasan seorang pejabat.

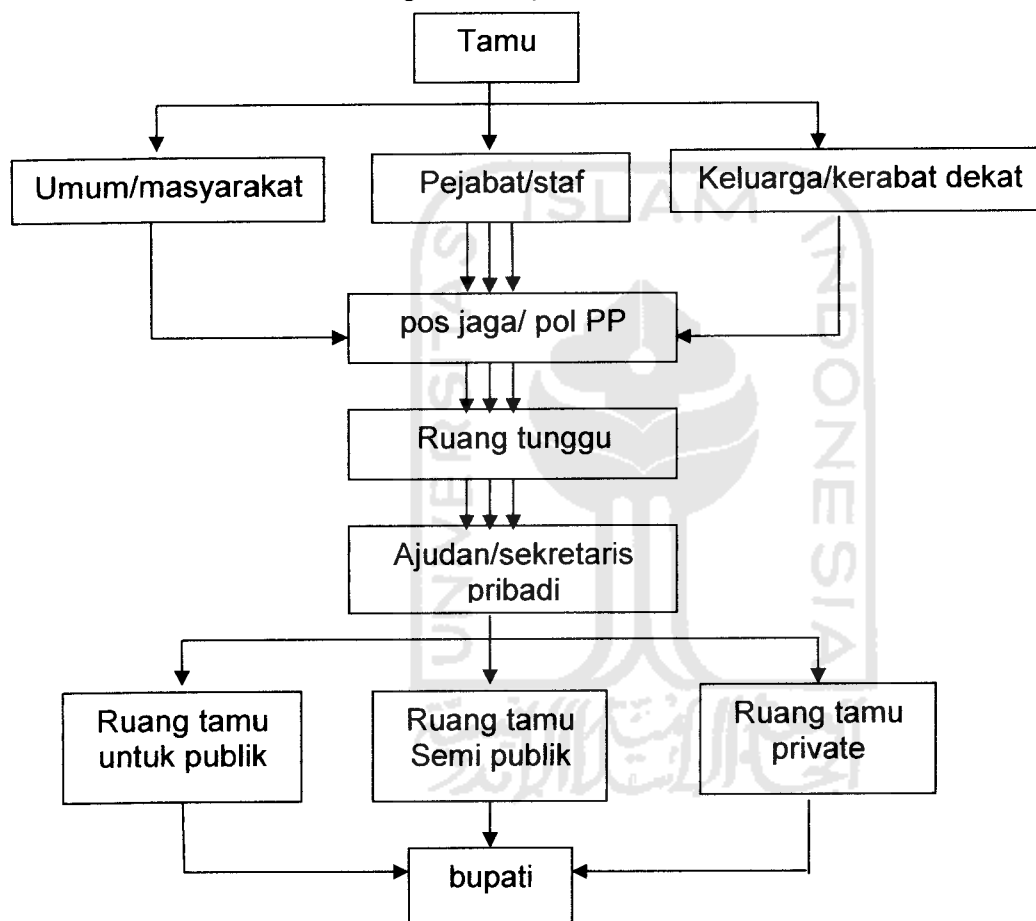
Aktivitas keprotokoleran tersebut memiliki serangkaian pola yang dilakukan oleh berbagai macam individu yang berperan di dalamnya.³ Kata pola menyimbolkan gerakan dan perpindahan tiap individu, sedangkan aktivitas

³ .A Aziz Buchari, *Protokol dan Pelaksanaannya*, hlm. 7

adalah kumpulan gerakan individu dengan kata lain aktivitas adalah kumpulan dari pola-pola yang di lakukan tiap individu. ⁴

Contoh skema singkat jalur yang di tempuh tamu jika berkunjung ke rumah dinas bupati Ogan Ilir :

Gambar 1.2
Gambar diagram alur protokoler di rumah dinas bupati Ogan Ilir



Analisa yang di dapat dari sistem protokoler yaitu sebuah aktivitas yang terstruktur. Sebuah sistem protokoler dapat juga di simpulkan sebagai sekelompok perilaku penghuni yang terstruktur atau terikat dengan peraturan-

⁴ Ardiansyah Basha, *Evaluasi Perilaku Berwisata terhadap Lingkungan Taman Mini Indonesia Indah* (Bandung : Universitas Parahyangan) hlm. 52

peraturan, karena jika dilihat dari inti perilaku manusia, manusia memiliki perilaku yang berbeda dalam suatu ruang, bagaimana mereka bergerak, berinteraksi dan beraktivitas di suatu lokasi.

Penghuni sebagai manusia menurut analisa *Stilitz & Kamimon* di lihat secara psikologis juga akan menempatkan diri dimana ia bisa melihat dengan baik dan tidak menghalangi manusia lain.

Dan juga menurut *David Carter*, "perilaku manusia untuk menempatkan dirinya pada posisi yang layak dan menghormati orang lain". Sehingga setiap manusia akan memiliki ruang jarak dan jarak tersebut akan menentukan diri seseorang nyaman atau tidak di dalam lingkungannya. Aktivitas adalah perilaku dalam ruangan ⁵



1. Situasi dan kondisi (keadaan lingkungan sekitar)
2. Usia
3. Jenis kelamin
4. Intelegensi
5. Golongan/ kelas (bawah atau atas)
6. Mood

Pada bagan aktivitas diatas Sistem protokoler banyak mengatur perilaku penghuni di suatu situasi dan kondisi contoh jika ada sebuah acara atau seremonial baik yang bersifat kenegaraan atau suatu acara rutin. Aktivitas

⁵ "ibid", hal 46

penghuni dalam sebuah protokoler di kelompokan menurut golongan atau kelas, *layout* ruangnya pun harus mengikuti aturan protokoler.

Sistem protokoler dijadikan sebuah kriteria atau tolok ukur yang kemudian akan menghasilkan sebuah perilaku, *image*, aksi, dan menjadi sebuah rekomendasi ketika bangunan akan didirikan atau pada saat *melayout* suatu ruangan.

Sebagai sebuah tolok ukur maka dalam merancang ruang sistem protokoler tersebut akan memiliki hubungan serta mempengaruhi dalam mendesain, sehingga sistem protokoler tersebut akan membentuk perilaku individu yang terkait dengan perilaku sosial penghuninya. Dilihat dari pengertian protokoler itu sendiri dalam bahas Indonesia "tata tertib pergaulan Internasional sopan santun diplomatik" atau dengan istilah "*Rules of International politness*".⁶

Sebuah sistem protokololer pada akhirnya juga akan membedakan ruangan menurut tingkat privasinya sehingga terbentuklah hirarki ruang, mulai dari ruang yang sangat publik maupun yang sangat pribadi atau privat.

Menganalisa beberapa denah rumah kedinasan bupati tepatnya empat sampel denah yang dipakai. Pada denah tersebut diamati hal apa saja yang cenderung memiliki persamaan dan perbedaan, sejauh mana sebuah sistem keprotokolan itu mempengaruhi, dan apakah di tiap rumah dinas pengaruhnya akan sama terhadap rancangan tata ruangnya.

⁶ A Aziz Buchari, *Protokol dan Pelaksanaannya* (Palembang : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka) hlm. 2

4. Faktor preferensi atau keinginan pribadi individual

Manusia sebagai makhluk individu juga memiliki keinginan mengaktualisasikan dirinya, terutama jika seseorang tersebut memiliki kekuasaan, penghasilan dan status yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang ada di didalam lingkungannya. Hal tersebut juga terjadi pada seorang bupati sebagai penghuni yang memiliki status jabatan yang paling tinggi di suatu daerah terutama di dalam rumah dinas.

Sebuah rumah dinas akan mengalami perubahan disetiap periode jabatannya. Perubahan bisa berupa adanya penambahan ruang, perubahan fungsi ruang atau dapat juga penambahan fasilitas misal kolam renang, lapangan bulu tangkis, kolam ikan. Setiap bupati memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu renovasi pada bangunan akan terus ada di setiap pergantian bupati.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan umum :

Bagaimana hubungan antara sistem protokoler dengan rancangan tata ruang rumah kedinasan di empat kabupaten ?

2. Sub permasalahan :

- a. Apakah sistem protokoler mempengaruhi pola atau hirarki ruang-ruang di rumah kedinasan ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola kedalaman ruang?
- c. Bagaimana hubungan preferensi atau keinginan pribadi seorang bupati turut mempengaruhi pola ruang di rumah dinas ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis lebih jelas tentang hubungan dan pengaruh sebuah sistem protokoler di rumah kedinasan seorang bupati dengan rancangan tata ruangnya, dan mencari pola atau kecenderungan apa saja yang akan terbentuk akibat pengaruh tersebut.

Kemudian dicoba untuk dirumuskan sehingga dapat menghasilkan sebuah standar-standar dalam mendisain. Standar-standar tersebut dapat dijadikan acuan pada saat merancang kembali bangunan yang sama.

D. BATASAN / DEFENISI

1. **Sistem Protokoler**

Susunan suatu kegiatan yang mengatur jalannya suatu acara, pertemuan atau perjamuan, yang diselenggarakan dalam rumah kedinasan seorang bupati. (A.Aziz Buchari, *Protokol dan Pelakasanaanya*)

2. **Tatanan ruang**

Susunan suatu bentuk tiga dimensi yang solid dan kosong, Dan dapat mengatur sebuah aktifitas pergerakan misal kedatangan dan keberangkatan, tempat masuk dan keluar, di dalam bangunan rumah kedinasan bupati. (D.K Ching, *Arsitektur Bentuk dan Tatanan, edisi ke-2*)

3. **Kedalaman ruang**

Pola jangkauan atau jarak jangkauan yang diawali dari pintu terluar sebagai titik awal, lalu diteruskan ketitik yang terdekat yang berada di ruang berikutnya dari titik pertama. (Hillier and Hanson, *spatial syntax*)

4. **Power (political)**

Kekuasaan yang tidak hanya kemampuan untuk membuat keputusan tetapi mengatur hubungan kemudian mengendalikan politik dan orang lain. (Thomas Marcus, *building and power*)

Jadi batasan penelitian adalah :

Pengaruh sistem protokoler terhadap penataan ruang-ruang di dalam rumah kedinasan bupati dengan membandingkan empat denah rumah kedinasan bupati kemudian menganalisis pola-pola ruang yang terbentuk berdasarkan kedalaman tiap ruang, serta hirarki ruang yang terbentuk dari masing-masing ruang, salah satu faktor yang dilihat adalah *status power structure* atau tingkat kekuasaan seseorang.

Hasil analisis dipakai untuk membuat suatu standar-standar dalam mendisain tiap ruangan dalam rumah kedinasan sehingga penggunaannya nanti akan sesuai dengan fungsi masing-masing.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

1. BAB I PENDAHULUAN

Rumah kedinasan bupati di empat kabupaten propinsi Sumatera Selatan dan rancangan tata ruang rumah kedinasan yang berhubungan dengan sistem protokoler.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Perbandingan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya mengenai kedalaman dan hirarki ruang.

3. BAB III RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode *Spatial Syntax*, sebuah metode untuk mencari format yang lebih teratur dalam sebuah bangunan, yang kemudian di susun dalam satu grafik.

4. BAB IV HASIL SURVEY LAPANGAN

Data berupa denah bangunan, wawancara fungsi pemakaian ruang dan dokumentasi ruangan-ruangan.

5. BAB V ANALISIS PENGARUH SISTEM PROTOKOLER TERHADAP RANCANGAN TATA RUANG

Analisis masing-masing ruang didalam bangunan rumah kedinasan. Tiap ruang diberi nilai kedalaman. Bentuk hasil analisis berbentuk penomoran pada tiap ruang. Setelah itu akan didapatkan alur sirkulasi tiap ruang yang terhubung melalui pintu-pintu masuk ke masing-masing ruang, nilai kedalaman ruang dipindahkan kediagram menurut level masing-masing ruang.

6. BAB VI REKOMENDASI

Redisain dari denah keempat rumah kedinasan sesuai dengan ruang penomoran yang telah diberi nilai kedalaman atau dept space dan hirarki ruangnya.